TRIBUN PONTIANAK

Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Okt Sept) Nov Des

2024

Hal.: 10



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pj Bupati Harap DPRD Prioritas APBD 2025

KUBU RAYA, TRIBUN -Penjabat (Pj) Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman berharap mempercepat proses penyiapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya periode 2024-2029.

"Karena AKD ini menyangkut dengan berbagai agenda yang menjadi prioritas dalam dekat ini, satu diantaranya pengesahan atau persetujuan dari DPRD terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025," kata Pj Bupati Sy Kamaruzaman, belum lama ini.

Pi Bupati berharap agar semua ini bisa segera dilakukan, sehingga program-program pemerintah daerah lainnya juga bisa terlaksana dengan tepat waktu dan tepat guna.

"Saya ucapkan selamat kepada anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya yang diilantik hari ini, semoga amanah dan mengedepankan kepentingan rakyat. Karena rakyat telah memilih anggota dewan ini, maka bekerjalah dengan amanah untuk rakyat," katanya.

Sebelumnya, Penjabat (Pi) Bupati Kubu Rava Svarif Kamaruzaman menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan agenda khusus Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Periode 2024-2029, pada Selasa (17/9/2024), di The Q Hall Qubu Resort, Kubu Raya.

Dalam sambutan Mendagri, Anggota DPRD tentang pemerintahan daerah di mana terdapat tiga fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan. Adapun fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan pembentukan pro-



duk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah.

"Hal yang perlu dipahami oleh para Anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun yang jauh lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakvat, mampu memecahkan masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan," jelasnya.

"Di samping itu, perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat," lanjutnya menambahkan.

Lebih lanjut, fungsi anggaran merujuk kepada komitmen setiap Anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat alih-alih untuk kesejahteraan pribadi dan golongan.

"Untuk itu, Anggota DPRD selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat," pungkasnya.